

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dirancang untuk menyiapkan peserta didik atau lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan mampu mengembangkan sikap profesional di bidangnya. Namun, Sekolah Menengah Kejuruan dituntut bukan hanya sebagai penyedia tenaga kerja yang siap bekerja pada lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri, tetapi juga dituntut untuk mengembangkan diri pada jalur wirausaha, agar dapat maju dalam berwirausaha walaupun dalam kondisi dan situasi apapun.

Soenarto, Amin, dan Kumaidi menjelaskan bahwa “*vocational high school (VHS) is one of the education institutions responsible for producing skilled workers with the ability to adapt to the changes in the need of the society as the effect of the dynamic international economy with the support of Indonesian demographic bonus*” (Soenarto, Amin, & Kumaidi, 2017). Diartikan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah salah satu lembaga pendidikan yang bertanggung jawab untuk menghasilkan pekerja terampil dengan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dalam kebutuhan masyarakat sebagai efek dari ekonomi internasional yang dinamis dengan dukungan bonus demografi Indonesia.

Saat ini SMK sedang gencar-gencarnya digalakkan oleh pemerintah. Kebijakan ini ditempuh setelah melihat kenyataan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) paling tertinggi menurut tingkat pendidikan adalah lulusan sekolah menengah kejuruan, berikut disajikan pada tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1 Tabel Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Agustus 2015-2019

TPT	Agustus 2015	Agustus 2016	Agustus 2017	Agustus 2018	Agustus 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tidak/Belum Pernah Sekolah/Belum Tamat & Tamat SD	2,74	2,88	2,62	2,43	2,41
Sekolah Menengah Pertama	6,22	5,71	5,54	4,80	4,75
Sekolah Menengah Atas	10,32	8,72	8,29	7,95	7,92
Sekolah Menengah Kejuruan	12,65	11,11	11,41	11,24	10,42
Diploma I/II/III	7,54	6,04	6,88	6,02	5,99
Universitas	6,40	4,87	5,18	5,89	5,67
Total	6,18	5,61	5,50	5,34	5,28

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2019.

Berdasarkan data dari agustus 2015-agustus 2019, TPT pada seluruh jenjang pendidikan untuk sekolah menengah kejuruan (SMK) masih yang paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain. Kenyataan tersebut dapat diartikan bahwa masih kurangnya keterampilan lulusan pendidikan menengah untuk masuk dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Data Sakernas Tahun 2010 dan 2018 (Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2019) menunjukkan bahwa mayoritas tenaga kerja di Indonesia masih didominasi lulusan pendidikan dasar yakni SD dan SMP sederajat serta tidak/belum tamat SD, meskipun persentasenya selama 2010-2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan lebih dari 10 persen dari 69,45 persen menjadi 58,77 persen. Share tenaga kerja lulusan SMA lebih besar jika dibandingkan dengan tenaga kerja lulusan SMK. Adapun jumlah pekerja lulusan

SMK di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2010 sebesar 71.631 tenaga kerja dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga menjadi 120.616 orang pada Tahun 2018. Meskipun demikian share tenaga kerja lulusan SMK terhadap total tenaga kerja di Provinsi NTB relatif rendah, hingga tahun 2018, hanya 5,6 persen (Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2019).

Tingginya angka pengangguran berdasarkan hasil seminar pendidikan nasional faktor-faktornya adalah: (a) kurang selarasnya perencanaan pembangunan pada sektor pendidikan dengan perkembangan dunia kerja; (b) preferensi atau pemilihan jenis pekerjaan yang diminati; (c) kurang sesuaianya kualifikasi angkatan kerja terdidik dengan kebutuhan penyedia lapangan pekerjaan; serta (d) banyaknya lembaga pendidikan yang belum menghasilkan lulusan yang siap diserap oleh pasar kerja (Ringkasan Eksekutif Seminar Nasional Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta, 2010: 13).

Hal senada diungkapkan oleh Muladi, A. P. Wibawa, dan K. M. Moses. dalam penelitiannya menjelaskan bahwa: *“cooperation between vocational high schools with industries has great impact on the quality of vocational education as seen in the strong positive relationship”* (Muladi, A. P. Wibawa, & K. M. Moses, 2017). Kerjasama antara sekolah menengah kejuruan dengan industri memiliki dampak besar dan hubungan positif yang kuat terhadap kualitas pendidikan kejuruan.

Problematika yang masih dihadapi oleh SMK menurut hasil penelitian Said Umar, *et. al.*, menemukan bahwa:

(1) the high enthusiasm of students to attend school in Vocational High School, not accompanied by the readiness of most Vocational High School in preparing facilities and infrastructure as well as competent educators, thus impacting the achievement of the objective of increasing the resources students are less than optimal, (2) the government's partiality in the management and development of Vocational High School is not optimal, it is reflected in the unavailability of macro policy in the form of "Regional Regulation" in the management and development of Vocational High School. The micro policy undertaken by the relevant agencies is also not optimal and professional in implementation, it is reflected from the inability of the education office to innovate in the guidance of Vocational High School (Said Umar, et. al., 2017).

Dalam kenyataannya tingginya antusiasme siswa untuk bersekolah di sekolah menengah kejuruan, tidak dibarengi dengan kesiapan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik yang kompeten, sehingga berdampak pada kurang optimalnya pencapaian tujuan dalam upaya peningkatan sumber daya. Selain itu, keberpihakan pemerintah dalam pengelolaan dan pengembangan sekolah menengah kejuruan tidak optimal, hal ini tercermin dari tidak tersedianya kebijakan makro berupa "Peraturan Daerah" dalam pengelolaan dan pengembangan sekolah menengah kejuruan. Kebijakan mikro yang dilakukan oleh instansi terkait juga tidak optimal dan profesional dalam implementasinya, hal ini tercermin dari ketidakmampuan dinas pendidikan untuk berinovasi dalam pembinaan sekolah menengah kejuruan.

Adapun Pardjono, Sugiyono, dan Budiyono menjelaskan bahwa *"vocational education cannot be removed from existing workforce development"* (Pardjono, Sugiyono, dan Budiyono, 2015). Diartikan bahwa pendidikan kejuruan tidak dapat dihilangkan dari pengembangan tenaga kerja yang ada. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Ramayani, Aimon, and Anis (2012) yang menyatakan bahwa *"Indonesian government has to support the efforts made to*

improve manpower productivity by producing policy that focuses on education and health and providing more fund in the area related to human resource building". Pemerintah Indonesia harus mendukung upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan menghasilkan kebijakan yang berfokus pada pendidikan dan kesehatan dan menyediakan lebih banyak dana di bidang yang terkait dengan pembangunan sumber daya manusia.

Selain permasalahan di atas, permasalahan terkait jumlah guru produktif SMK dibandingkan dengan kebutuhan ideal, mengungkapkan bahwa data secara nasional masih mengalami kekurangan guru produktif, hal tersebut tentunya akan berdampak pada kualitas lulusan SMK. Adapun rincian kebutuhan guru produktif SMK peneliti sajikan pada gambar 1.2. di bawah ini:

Tabel 1.2. Kebutuhan Guru Produktif SMK

Bidang Keahlian (Produktif)	Status Guru				Jumlah Guru Total **	Jumlah Guru Tetap ***	Ideal	Selisih Total ****	Selisih Guru Tetap *****
	Lulusan	Jumlah Rombel	Siswa Kelas 1 saat ini	Jumlah Rombel					
Teknologi dan Rekayasa	10.200	2.184	2.675	9.321	24.380	15.059	37.940	-13.560	-22.881
Teknologi Informasi dan Komunikasi	322	98	178	463	1.051	598	1.340	-279	-742
Kesehatan	32	37	77	110	256	146	342	-86	-196
Agribisnis dan Agroteknologi	1.640	126	123	1.118	3.007	1.889	3.533	-526	-1.644
Perikanan dan Kelautan	822	137	242	1.051	2.252	1.201	2.370	-118	-1.169
Bisnis dan Manajemen	7.768	2.801	4.085	12.488	27.142	14.654	51.571	-24.429	-36.917
Pariwisata	3.016	299	501	2.226	6.042	3.816	8.810	-2.768	-4.994
Seni Rupa dan Kerajinan	471	40	56	235	802	567	882	-80	-315
Seni Pertunjukan	13	2	2	10	27	17	28	-1	-11
Jumlah Guru Bidang Keahlian (Produktif)	24.284	5.724	7.939	27.022	64.969	37.947	106.815	-41.846	-68.868

Sumber: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2015.

Permasalahan kekurangan guru produktif khususnya dalam bidang pariwisata yang cukup tinggi seperti dalam tabel di atas, sejalan dengan pendapat Minskoff dan DeMoss mengungkapkan, *“the special education teachers*

contributed their expertise in academic learning and tasks analysis while the vocational teachers contributed their expertise in their vocational content area" (Minskoff & DeMoss, 1993). Guru mata pelajaran umum berkontribusi dalam mentransfer materi terkait pembelajaran akademis dan analisa tugas, adapun guru kejuruan atau produktif berkontribusi terhadap pengetahuan sesuai bidang keahlian. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diartikan guru kejuruan atau guru produktif khususnya pada bidang keahlian pariwisata sangat diperlukan di SMK dalam upaya penempaan *skill* sesuai bidang keahliannya.

Selanjutnya permasalahan sarana dan prasarana (fasilitas) SMK yang diungkapkan oleh Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, dalam konferensi pers di LBH Jakarta, menyatakan bahwa:

"Hampir 50 persen SMK tak punya fasilitas memadai,". Inilah yang menyebabkan lulusan SMK tidak siap kerja. Dari sisi teknologinya saja kadang sudah ketinggalan. Akhirnya saat di industri dengan teknologi terbaru mereka tidak bisa mengoperasikan karena di sekolah belum diajarkan (News.okezone.com, 2016).

Berdasarkan gambaran permasalahan SMK di atas, pemerintah dalam hal ini berupaya meningkatkan kualitas SDM khususnya pada SMK, dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, yang diikuti dengan nota kesepahaman antar beberapa kementerian terkait dan pemerintah daerah, telah menjadi roda pendorong dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan SMK di Indonesia. Adapun terdapat 5 (lima) area revitalisasi SMK telah ditetapkan yang meliputi: (1) kurikulum, (2) guru dan tenaga kependidikan, (3) kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri (dudi), (4) sertifikasi dan akreditasi dan (5) sarpras dan kelembagaan.

Menelisik revitalisasi SMK telah ditetapkan pemerintah yang salah satunya adalah kurikulum SMK yang diarahkan untuk dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan nasional dan daerah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan diantaranya dengan mengembangkan model *link and match*. Sedangkan, substansi inti kualitas, diarahkan pada pemenuhan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, serta peningkatan kompetensi lulusan agar dapat bersaing di dunia kerja.

Program revitalisasi SMK khususnya terkait dengan kurikulum mendorong program pengembangan SMK dengan basis potensi daerah, dimana Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah yang masuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) destinasi wisata prioritas nasional. Salah satu program studi keahlian untuk menciptakan lulusan yang terdidik pada sekolah menengah kejuruan adalah program pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan kurikulum untuk menciptakan lulusan yang memiliki keterampilan dan dibutuhkan di dunia usaha dan dunia industri khususnya bidang pariwisata.

Pariwisata sekarang ini merupakan suatu tuntunan hidup, yakni untuk menghilangkan kejenuhan dari rutinitas pekerjaan. Permintaan orang untuk melakukan perjalanan wisata, dari tahun ke tahun terus meningkat. Peningkatan permintaan tersebut dapat dilihat dari angka kunjungan wisata yang semakin bertambah dari tahun ke tahun. Fenomena tersebut terjadi pada pariwisata di wilayah Kota Mataram pada khususnya dan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Umumnya. Mataram sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan

pusat segala kegiatan aktivitas baik ekonomi, perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata. Kota Mataram menjadi sentral perkembangan semua bidang sehingga dapat ikut berperan langsung dalam lingkup nasional.

Peningkatan kebutuhan orang untuk wisata, mengakibatkan dibutuhkannya peningkatan jasa pelayanan akan pariwisata, tuntutan akan kelengkapan fasilitas dan sarana prasarana pariwisata. Oleh karena itu diperlukan penunjang, yakni sumber daya manusia sebagai petugas untuk pelayanan pariwisata. SMK di Kota Mataram yang membuka program keahlian bidang pariwisata adalah salah satu wadah pendidikan yang menghasilkan generasi profesional yang dapat meningkatkan kualitas pariwisata Kota Mataram pada khususnya dan Nusa Tenggara Barat pada umumnya.

Keberhasilan yang telah dicapai beberapa SMK di Kota Mataram salah satunya diakibatkan karena adanya kebersamaan dan antusias guru dan pegawai yang ingin menjadikan sekolah ini menjadi sekolah rujukan/unggulan sehingga menjadi model bagi sekolah-sekolah kejuruan lainnya. SMK di Kota Mataram selalu berupaya meningkatkan mutu sekolah diantaranya dengan terus menerus memperbaharui sistem manajemen kurikulum sekolah.

Hal ini, sesuai dengan amanat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan lebih khusus di atur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa kurikulum pada

sekolah menengah kejuruan /madrasah aliyah kejuruan yang telah dilaksanakan sejak tahun ajaran 2013/2014 disebut Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.

Adapun beberapa permasalahan yang terjadi dalam implementasi kurikulum dari hasil studi pendahuluan di lapangan antara lain: masih kurangnya guru yang mengampu mata pelajaran produktif, masih minimnya melibatkan guru dalam kegiatan pelatihan oleh tim pengembang kurikulum dinas pendidikan, dan masih tingginya angka pengangguran SMK. Permasalahan tersebut sebagaimana Ornstein dan Hunkins menyatakan bahwa *“successful curriculum implementation results from careful planning, which focuses on three factors: people, programs, and processes”* (Ornstein & Hunkins, 2018).

Implementasi kurikulum yang sukses salah satunya ditunjang oleh komitmen pendidik, pendidik harus mengubah beberapa kebiasaan dan pandangan mereka. Banyak sekolah gagal dalam mengimplementasikan program mereka karena mereka mengabaikan faktor orang dan menghabiskan waktu dan uang hanya memodifikasi program atau proses. Proses organisasi penting juga dilakukan untuk dapat menggerakkan orang ke arah yang diperlukan untuk keberhasilan implementasi kurikulum.

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia (Permendikbud No. 70 Tahun 2013). Kurikulum 2013 (K13) merupakan kurikulum operasional yang

disusun oleh sekolah yang melibatkan Tim Kerja, terdiri dari Tim Pengembang Kurikulum (TPK) sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, konselor, dan komite sekolah. Kurikulum 2013 sekolah menengah kejuruan sebagaimana terdiri atas: (a) kerangka dasar kurikulum; (b) struktur kurikulum; (c) silabus; dan (d) pedoman mata pelajaran.

Selain itu, kurikulum disusun sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah serta pertimbangan komite sekolah, dengan tetap memperhatikan karakteristik peserta didik, potensi dan kondisi sekolah, serta kondisi daerah, yang mampu mewadahi kepentingan nasional dan kepentingan daerah dalam rangka membangun kehidupan bermasyarakat.

Program *link and match* pembangunan di bidang pendidikan menganjurkan perlunya dunia pendidikan menggali potensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja, penulis mengangkat tema evaluasi implementasi kurikulum program keahlian usaha perjalanan wisata untuk mengetahui relevansi kurikulum yang digunakan. Dengan penelitian ini, diharapkan Kementerian Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan Kota Mataram dapat menemukan formulasi yang tepat dalam menyiapkan kurikulum SMK yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan industri khususnya Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Indonesia pada umumnya.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah implementasi kurikulum program keahlian usaha perjalanan wisata (UPW) di SMK Kota Mataram dengan subfokus sebagai berikut:

1. Latar belakang, dasar hukum, tujuan, dan sasaran implementasi kurikulum program keahlian usaha perjalanan wisata (UPW).
2. Program kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, peserta didik, sarana dan prasarana, dan pembiayaan implementasi kurikulum program keahlian usaha perjalanan wisata.
3. Perencanaan, pelaksanaan, penilaian hasil belajar, dan pengawasan proses pembelajaran.
4. Ketercapaian implementasi kurikulum program keahlian usaha perjalanan wisata yang meliputi: hasil uji kompetensi teori kejuruan, hasil uji kompetensi praktik kejuruan, dan hasil praktik kerja industri, dan keterserapan lulusan.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan fokus dan subfokus penelitian tersebut di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana komponen evaluasi *contexts* yang meliputi: latar belakang, dasar hukum, tujuan, dan sasaran implementasi kurikulum program keahlian usaha perjalanan wisata (UPW) di SMK Kota Mataram?
2. Bagaimana komponen evaluasi *inputs* yang meliputi: program kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, peserta didik, sarana dan prasarana, dan pembiayaan implementasi kurikulum program keahlian usaha perjalanan wisata (UPW) di SMK Kota Mataram?
3. Bagaimana komponen evaluasi *process* yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penilaian hasil belajar, dan pengawasan proses pembelajaran

implementasi kurikulum program keahlian usaha perjalanan wisata (UPW) di SMK Kota Mataram?

4. Bagaimana komponen evaluasi *product* yang meliputi: hasil uji kompetensi teori kejuruan, hasil uji kompetensi praktik kejuruan, hasil praktik kerja industri, dan keterserapan lulusan implementasi kurikulum program keahlian usaha perjalanan wisata (UPW) di SMK Kota Mataram?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Mendapatkan informasi tentang kesesuaian kurikulum SMK dengan peningkatan kompetensi pengetahuan dan keterampilan lulusan siswa khususnya di Kota Mataram sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri setempat. Informasi dari hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat dijadikan masukan bagi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan maupun Direktur Direktorat Pendidikan Dasar dan Direktur Direktorat Pendidikan Menengah dalam rangka mengembangkan dan menyempurnakan kurikulum SMK.

2. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota Mataram

Memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi kepala dinas pendidikan dan pejabat terkait dalam mengembangkan kurikulum SMK, serta memberikan masukan tentang upaya yang dapat ditempuh melalui pembuatan kebijakan yang mendukung implementasi kurikulum SMK.

3. Para Guru dan Siswa SMK di Kota Mataram

Memberikan masukan tentang cara mengimplementasikan kurikulum pendidikan SMK dalam proses belajar mengajar yang disesuaikan dengan kebutuhan tingkat kompetensi pengetahuan dan keterampilan yang dikehendaki oleh dunia usaha dan dunia industri. Bagi siswa dapat mengambil berbagai pengetahuan terkait implementasi kurikulum yang dapat dipraktekkan dalam meningkatkan hasil belajar dan kompetensi.

4. Peneliti Lainnya

Memberikan masukan kepada peneliti yang tertarik melakukan penelitian tentang evaluasi manajemen implementasi kurikulum SMK di Kota Mataram agar dapat melakukan penelitian dengan metode lain.

E. Kebaruan Penelitian (*State of The Art*)

Kebaruan penelitian (*state of the art*) dalam penelitian ini adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1.3 Perbandingan Hasil Penelitian yang Relevan

No.	Penulis	Publikasi	Hasil Penelitian
1.	Hatice Sancar Tokmak, H. Meltem Baturay, and Peter Fadde	Applying the Context, Input, Process, Product Evaluation Model for Evaluation, Research, and Redesign of an Online Master's Program. <i>The International Review of Research in Open and Distributed Learning</i> , 14(3), 273-293. DOI: https://doi.org/10.19173/irrodl.v14i3.148	penelitian ini menunjukkan bahwa desain model pembelajaran daring lebih diminati oleh mayoritas siswa.
2.	Aslan, Dolgun dan Rafet Günay	An Evaluation of High School Curricula Employing Using the Element-based Curriculum Development Model. <i>Journal of Education and Training Studies</i> , Vol. 4, No. 7	Hasil ini menunjukkan bahwa program pengajaran/kurikulum berdasarkan pendekatan konstruktivis belum sepenuhnya diadopsi/dianut oleh para guru, akan tetapi mereka tetap bertanggung jawab terhadap

	(April, 2016)	tugas mereka, oleh karena itu sulit bagi rencana tersebut untuk mencapai tujuannya. Hasil yang diperoleh juga menunjukkan bahwa ada masalah dengan semua elemen dari kurikulum yang ada dan lebih jauh lagi bahwa guru yang berada di posisi pelaksanaan program tidak mengetahui unsur-unsur kurikulum dan kurikulum tidak efisiensi sesuai yang diharapkan.
3.	Shamsa Aziz, Munazza Mahmood, Zahra Rehman	<p>Implementation of CIPP Model for Quality Evaluation at School Level: A Case Study.</p> <p><i>Journal of Education and Educational Development. Vol. 5 No. 1 (June 2018).</i></p>
		penelitian menunjukkan bahwa kelompok sekolah berfokus pada pendidikan berkualitas dengan menggunakan berbagai cara, seperti teknologi canggih, komunikasi yang efektif, kursus yang relevan serta strategi belajar mengajar; Namun, ditemukan bahwa guru lebih fokus pada pekerjaan teoritis dan hafalan, yang memberikan tekanan pada siswa dan memiliki efek negatif pada kemampuan intelektual mereka. Selain itu, adanya kekurangan ruang yang layak, lingkungan yang kurang efektif dan sekolah-sekolah terletak di gedung sewaan.
4.	Jaedun, Amat, Hariyanto, V. Lilik, & Nuryadin, E.R	<p>An Evaluation of the Implementation of Curriculum 2013 at the Building Construction Department of Vocational High Schoos in Yogyakarta.</p> <p><i>Journal Of Education, Volume 7, Number 1, November 2014.</i></p>
		Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Kesiapan guru dalam perencanaan pelajaran untuk mengimplementasikan Kurikulum 2013 diukur dari ketersediaan alat pembelajaran, dan kemampuan guru untuk merencanakan proses pembelajaran, berada dalam kategori kurang siap. (2) Kesiapan guru dalam menerapkan proses pembelajaran untuk menerapkan Kurikulum 2013 berada dalam kondisi yang kurang siap. Temuan

		menunjukkan bahwa: (a) guru tidak memahami prinsip dan penerapan model pembelajaran ilmiah sebagai pendekatan yang sesuai untuk Kurikulum Implementasi 2013; (b) meskipun semua guru telah merumuskan kegiatan pembelajaran awal, inti dan akhir dari tahapan pembelajaran, realisasi kegiatan ini tidak sesuai dengan ketentuan, (c) guru tidak menerapkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam kegiatan belajar. (3) Kesiapan guru dalam penilaian pembelajaran untuk menerapkan Kurikulum 2013 berada dalam kondisi yang kurang siap. Ini ditunjukkan oleh pemahaman guru yang tidak memadai tentang prinsip, prosedur, dan teknik penilaian otentik, dan tugas yang diberikan untuk siswa tidak menggambarkan tugas otentik.
5.	Ashar & Irmawati	<p>The Implementation of the 2013 Curriculum of English at SMKN 1 Bantaeng: An Evaluative Study.</p> <p><i>ELT Worldwide Journal of English Language Teaching</i>, 3 (2). pp. 156-168.</p>
6.	Heri Retnawati, Samsul Hadi, & Ariadie Chandra Nugraha	<p>Vocational High School Teachers' Difficulties in Implementing the Assessment in Curriculum 2013 in Yogyakarta Province of Indonesia.</p> <p><i>International Journal of Instruction</i>, Vol.9, No.1 DOI: 10.12973/iji.2016.914a</p>

menemukan aplikasi yang layak untuk menggambarkan prestasi belajar siswa.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas diharapkan dapat mampu mengisi kesenjangan penelitian (*research gap*) yang selama ini belum dianalisis. Terdapat beberapa perbedaan mendasar yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu dan hal berikut yang menjadi kebaruan penelitian (*state of the art*), yaitu:

1. Penelitian ini fokus pada implementasi kurikulum program keahlian usaha perjalanan wisata (UPW) di SMK.
2. Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi aspek perencanaan, penilaian, dan kemampuan guru dalam implementasi kurikulum, akan tetapi lebih komprehensif, mulai dari aspek: (1) *contexs*, meliputi: latar belakang, dasar hukum, tujuan, dan sasaran; (2) *input*, meliputi: program kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, sarana dan prasarana, serta pembiayaan; (3) *process*, meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penilaian hasil belajar, dan pengawasan proses pembelajaran; dan (4) *product*, meliputi: hasil uji kompetensi teori kejuruan, hasil uji kompetensi praktik kejuruan, hasil praktik kerja industri, dan keterserapan lulusan.